

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

**Wira Yuda Pratama<sup>1)</sup>, Bunga Aprillia<sup>2)</sup>, Noer Apptika Fujilestari<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Program PPM merupakan kebijakan Pemerintah Kota Cimahi yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis lingkungan RW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan utama seperti Lurah, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPM di Kelurahan Melong belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, serta kendala administrasi proyek. Meski demikian, program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti saluran air, jalan lingkungan, dan fasilitas publik lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di antaranya adalah peningkatan komunikasi antar pelaksana dan keterlibatan konsultan pengawas dalam membantu administrasi teknis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat RW serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Program PPM, Kelurahan, Pemerintah.

### Abstact

*This study aims to examine the implementation of the Community Empowerment Development Program (PPM) in infrastructure development in Melong Subdistrict, South Cimahi District, Cimahi City. The PPM program is a local government policy intended to promote community participation in neighborhood-scale development. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation, involving key informants such as the village head, community leaders, and RW chairpersons. The results show that the implementation of PPM in Melong Subdistrict is not yet optimal. The main obstacles include lack of coordination, limited human resource capacity at the implementation level, and administrative project issues. Nevertheless, the program has had a positive impact on improving basic infrastructure*

*such as drainage, neighborhood roads, and public facilities. Efforts to overcome these challenges include strengthening communication between implementers and involving supervisory consultants to support technical documentation. This study recommends improving the capacity of RW-level implementers and enhancing the monitoring and evaluation system*

**Keywords:** PPM Program, Subdistrict, Government.

## **PENDAHULUAN**

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam pelaksanaannya, distribusi pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan melalui pendekatan kebijakan yang berbasis lokal dan partisipatif. Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sendiri yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, kebijakan lokal memegang peran penting dalam mendekatkan pembangunan kepada masyarakat serta mempercepat pencapaian keadilan sosial (Islamy, 1997).

Salah satu bentuk konkret kebijakan lokal dalam kerangka pembangunan partisipatif adalah Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur lingkungan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, serta memperkuat kapasitas sosial masyarakat di tingkat RW. Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terendah yang paling dekat dengan masyarakat, memegang peranan strategis dalam memastikan keberhasilan program ini. Fungsi kelurahan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan dan penggerak partisipasi masyarakat. Menurut Gie (1999), peran pemerintah daerah yang efektif dapat dicapai bila kelurahan mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya.

Di Kota Cimahi, pelaksanaan PPM diatur dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020. Salah satu kelurahan yang menjadi objek

pelaksanaan program ini adalah Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Dengan jumlah penduduk 49.118 jiwa dan 36 RW, Kelurahan Melong merupakan wilayah terluas dan terpadat di kecamatan tersebut. Dana PPM sebesar Rp2.698.320.912,- telah dialokasikan secara merata ke setiap RW untuk membiayai kegiatan pembangunan lingkungan. Namun, hasil pelaksanaan program masih menunjukkan berbagai permasalahan. Beberapa kegiatan seperti perbaikan drainase, pengecoran jalan, dan rehabilitasi fasilitas umum belum sepenuhnya sesuai harapan warga. Permasalahan utama mencakup lemahnya koordinasi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat RW, dan kurangnya pendampingan dari kelurahan serta konsultan pengawas.

Selain itu, pelaksanaan program di beberapa RW menghadapi kendala administrasi, seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dokumen yang tidak terdokumentasi dengan rapi, serta pelaksanaan fisik yang tidak tepat waktu. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi program, yang menurut Mustopawidjaya dan Tjokroamidjojo (2008), sering terjadi apabila kapasitas kelembagaan dan kualitas pelaksana kebijakan tidak diperkuat sejak awal. Untuk mengkaji permasalahan ini secara sistematis, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini menyatakan bahwa terdapat empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Santoso, 1998). Keempat variabel ini menjadi instrumen analisis utama dalam menilai sejauh mana pelaksanaan PPM di Kelurahan Melong telah dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antaraktor pelaksana dan faktor-faktor internal yang memengaruhi keberhasilan program secara menyeluruh (Agustino, 2006).

Penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan lokal dalam kerangka pembangunan berbasis masyarakat. Sementara secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi

pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Cimahi dan Kelurahan Melong, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program PPM di masa mendatang. Sebagaimana dinyatakan oleh Suharto (2005), keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat lokal dan kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam pembangunan infrastruktur. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, terdiri dari Lurah Melong, fasilitator lapangan, Ketua LPM, dan dua Ketua RW, yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Analisis data menggunakan teknik interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Oktober hingga Desember 2024. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh konteks sosial, dinamika kebijakan, serta persepsi pelaksana dan masyarakat terhadap implementasi program PPM di wilayah kelurahan.

## **PEMBAHASAN**

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Dalam konteks Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kelurahan Melong, implementasi program tersebut dapat dianalisis melalui empat syarat-syarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan menurut George C. Edward III, yakni Komunikasi, Sumber Daya,

Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi (Santoso, 1998). Keempat syarat-syarat ini digunakan sebagai analisis untuk memahami sejauh mana efektivitas program PPM dalam pembangunan infrastruktur lingkungan di tingkat RW.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan kunci awal keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Program PPM di Kelurahan Melong, komunikasi vertikal dari pemerintah kelurahan kepada para Ketua RW tidak berjalan secara optimal. Instruksi dan petunjuk teknis hanya disampaikan secara sepintas dalam forum rapat tanpa adanya pendalaman atau pendampingan tertulis yang sistematis. Hal ini menyebabkan Ketua RW mengalami kebingungan dalam memahami alur administrasi dan pelaksanaan proyek fisik, terutama bagi RW yang baru menerima program untuk pertama kalinya.

Informasi yang tidak lengkap dan tidak konsisten menjadi masalah utama. Beberapa RW melaporkan bahwa terdapat perubahan teknis terkait format laporan atau mekanisme pencairan dana yang tidak diinformasikan secara resmi, melainkan hanya melalui komunikasi informal. Akibatnya, beberapa RW mengalami keterlambatan dalam pelaporan atau bahkan melakukan kekeliruan dalam prosedur penggunaan dana. Ini membuktikan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya memerlukan penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan, konsistensi, dan kesinambungan.

Di sisi lain, komunikasi horizontal antarpelaksana di tingkat RW juga belum terbangun dengan baik. Tidak tersedia forum resmi bagi RW untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan PPM. Ini mengakibatkan setiap RW bekerja secara terpisah tanpa rujukan praktik terbaik dari RW lain. Padahal, penguatan komunikasi horizontal dapat menciptakan efek pembelajaran kolektif yang mempercepat perbaikan pelaksanaan program.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak dapat berjalan secara satu arah. Diperlukan adanya mekanisme dua arah yang memungkinkan RW memberikan umpan balik kepada pihak kelurahan maupun fasilitator kecamatan. Tanpa komunikasi yang terbuka, timbal

balik, dan terjadwal, kebijakan yang baik di atas kertas tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

## **2. Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Program PPM, Pemerintah Kota Cimahi telah mengalokasikan dana sekitar Rp2,6 miliar kepada Kelurahan Melong, yang kemudian dibagi rata ke 36 RW. Masing-masing RW menerima dana sekitar Rp75 juta. Alokasi dana ini tergolong signifikan untuk skala pembangunan lingkungan berbasis masyarakat. Namun, besar anggaran tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola proyek tersebut.

Sebagian besar Ketua RW tidak memiliki latar belakang teknis atau administratif untuk menangani proyek pembangunan infrastruktur. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan teknis, menghitung volume pekerjaan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Ketiadaan tenaga pendamping teknis di beberapa RW semakin memperparah kondisi tersebut. RW yang tidak mendapatkan pendamping, terpaksa mengandalkan inisiatif pribadi atau belajar dari RW lain yang juga belum tentu tepat.

Kesulitan ini berdampak pada kualitas output fisik program. Beberapa proyek seperti saluran air, jalan lingkungan, dan posyandu dibangun tanpa perencanaan teknis yang matang, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat. Selain itu, pengerjaan yang terburu-buru akibat pencairan dana yang telat menyebabkan proyek tidak dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan tanpa pengelolaan yang profesional dapat menimbulkan pemborosan dan hasil yang kurang berkelanjutan.

Kedepannya, alokasi dana program harus dibarengi dengan pelatihan teknis kepada para pelaksana. Pemerintah kelurahan dan konsultan pengawas seharusnya lebih aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada RW, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kegiatan. Ketersediaan tenaga pendamping juga perlu dipastikan merata,

agar pelaksana di lapangan tidak bekerja sendirian dalam situasi yang mereka tidak sepenuhnya pahami.

### **3. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Di Kelurahan Melong, sebagian besar Ketua RW memiliki sikap positif terhadap Program PPM. Mereka melihat program ini sebagai bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan di tingkat akar rumput. Antusiasme ini terlihat dari banyaknya RW yang turut melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta dari adanya inisiatif untuk melakukan gotong royong atau menambah swadaya masyarakat.

Namun, tidak semua pelaksana menunjukkan disposisi yang proaktif. Beberapa Ketua RW mengelola program secara formalitas semata, hanya mengikuti prosedur administrasi tanpa berusaha memahami makna dari program tersebut. Akibatnya, pelaksanaan program di RW tersebut cenderung lambat, kurang transparan, dan hasilnya tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, masyarakat pun tidak mengetahui bahwa program pembangunan sedang dilaksanakan di lingkungan mereka.

Disposisi juga dipengaruhi oleh pemahaman atas kebijakan. RW yang memahami filosofi pemberdayaan dalam PPM lebih cenderung mengajak masyarakat untuk terlibat dan menjaga hasil pembangunan. Sebaliknya, RW yang menganggap program ini hanya sebagai proyek tahunan pemerintah, cenderung menjalankannya tanpa partisipasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan pemahaman kebijakan (policy orientation) penting diberikan, agar pelaksana memahami bahwa keberhasilan program bukan hanya soal serapan dana, tapi juga soal pemberdayaan sosial.

Oleh karena itu, penguatan motivasi dan kesadaran pelaksana harus menjadi bagian dari strategi implementasi. Pemerintah Kota Cimahi perlu mendorong pembentukan forum RW atau komunitas pelaksana PPM sebagai wadah berbagi semangat dan tantangan. Dalam jangka panjang, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai internal pelaksana, bukan hanya oleh prosedur formal.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang kompleks tanpa koordinasi yang efektif dapat menjadi penghambat utama implementasi kebijakan. Dalam PPM di Kelurahan Melong, pelaksanaan program melibatkan kelurahan, fasilitator kecamatan, tim monitoring kota, konsultan pengawas, dan Ketua RW. Sayangnya, masing-masing aktor sering kali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang intensif dan berkelanjutan. RW sering tidak mengetahui kepada siapa mereka harus melapor saat menghadapi kendala teknis atau administrasi.

Ketiadaan sistem koordinasi formal menyebabkan banyak RW merasa bekerja sendiri. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang baku memperburuk situasi. Misalnya, waktu pencairan dana tidak selalu sejalan dengan rencana kerja RW, atau laporan yang disusun tidak diterima karena tidak sesuai format tanpa penjelasan atau panduan perbaikan. Prosedur birokrasi yang berbelit ini menimbulkan frustrasi di kalangan pelaksana dan memperlambat pelaksanaan proyek.

Selain itu, fungsi pengawasan oleh konsultan pengawas dan tim monitoring kota juga tidak berjalan konsisten. Banyak RW melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kunjungan lapangan dari pengawas, sehingga mutu pekerjaan tidak dapat dipastikan sesuai standar. Bahkan laporan pelaksanaan sering kali dikumpulkan hanya untuk kepentingan administratif, tanpa analisis evaluatif yang mendalam. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan bersifat simbolik, bukan substantif.

Untuk memperbaiki struktur ini, diperlukan sistem koordinasi berbasis platform digital atau forum tatap muka reguler antar pelaksana dan pengawas. Penentuan alur pelaporan yang jelas dan cepat, penyusunan SOP, serta penyederhanaan prosedur administratif akan sangat membantu memperlancar implementasi kebijakan. Struktur yang baik bukan hanya yang lengkap, tetapi yang dapat bekerja secara responsif dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

### **Refleksi Kebijakan**

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kelurahan Melong secara normatif telah dirancang sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah RW. Tujuan utama dari program



ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan lingkungan secara mandiri dan partisipatif. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut masih jauh dari kenyataan. Program PPM belum sepenuhnya menjadi proses pembelajaran sosial (social learning) bagi masyarakat dan pelaksana kebijakan, melainkan cenderung dipahami sebagai proyek administratif tahunan.

Realitas yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan seperti PPM sering kali mengalami kesenjangan antara desain dan implementasi. Dalam dokumen perencanaan, program ini mengedepankan prinsip inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Namun, pada tahap pelaksanaan, prinsip-prinsip tersebut belum tertanam kuat dalam budaya birokrasi maupun pada level masyarakat. Hambatan seperti minimnya komunikasi dua arah, lemahnya pendampingan, dan belum adanya sistem pembinaan berkelanjutan mencerminkan bahwa proses implementasi masih sangat prosedural, belum substansial.

Karena itu, refleksi terhadap PPM perlu diarahkan pada transformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas aktor lokal. Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memastikan proses pembangunan sosial-politik di tingkat lokal benar-benar berjalan. Jika hal ini tidak dibenahi, maka PPM hanya akan menjadi kegiatan rutinitas tanpa dampak pemberdayaan yang nyata. Transformasi dari “proyek pembangunan” menjadi “proses pemberdayaan” menjadi pekerjaan rumah penting ke depan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, secara umum belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini memiliki dukungan anggaran yang memadai dan disambut baik oleh masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang belum efektif menyebabkan kesenjangan informasi antar pemangku kepentingan, sementara lemahnya kapasitas teknis dan administrasi di tingkat RW menghambat efisiensi pelaksanaan. Di sisi lain, sikap pelaksana yang bervariasi antara antusias hingga pasif

menimbulkan ketimpangan dalam kualitas output program. Struktur birokrasi yang belum terintegrasi dengan baik juga menyulitkan pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif dan merata di seluruh wilayah RW.

Agar implementasi Program PPM di Kelurahan Melong dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang, disarankan kepada Pemerintah Kelurahan untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan pelatihan teknis kepada para pelaksana di tingkat RW, khususnya dalam aspek administrasi dan pelaporan. Selain itu, perlu disediakan tenaga pendamping teknis secara merata di setiap RW guna memastikan kualitas pelaksanaan proyek sesuai standar. Pemerintah Kota Cimahi juga perlu memperjelas prosedur koordinasi lintas aktor pelaksana serta menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan responsif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antar kelurahan untuk memperoleh gambaran lebih luas tentang variasi keberhasilan implementasi program serupa di wilayah yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, The Liang. 1999. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Penterjemah, Ricky Istamto). Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kansil. 1993. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudasir. 2012. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Mustopawidjaya A.R dan Bintoro Tjokroamidjojo. 2008. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturlalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Analisa dan Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Tarsito.
- Sujarto, Djoko. 1985. *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bhratara Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Andi Tama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumoprawiro, Hariyoso. 2002. *Pembangunan Birokrasi dan Kebijakanaksanaan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, Bayu. 1988. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Eresco.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solihin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

**Dokumen:**

- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar RI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi*.

**Jurnal, Skripsi dan Sumber Lainnya:**

- Bayu Tirtiyanto. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat di Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung*. Cimahi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Trisakti Julio Heryadhi. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga Di Kota Sukabumi*. Cimahi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Santoso, Amir. 1989. "Analisa Kebijakanaksanaan Publik; Masalah dan Pendakatan" *Jurnal Ilmu Politik* 4. Jakarta: Gramedia.